

## TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM TINJAUAN POLITIK PENDIDIKAN : PERAN DAN TANTANGANNYA DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

Ananda Yukhairiza Simatupang<sup>1</sup>, Zainal Efendi Hsb<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

[anandasimatupang2017@gmail.com](mailto:anandasimatupang2017@gmail.com), [zainal80.yes@gmail.com](mailto:zainal80.yes@gmail.com)

### ABSTRAK

---

*This study discusses the implementation of the Three Pillars of Education in the context of educational politics in Indonesia, with the main focus on understanding the factors that influence its implementation. These factors include the impact of educational political policies, government support, and internal dynamics within schools. The research method used is the analysis of secondary data obtained from academic literature and relevant policy documents. The results of the study indicate that consistent and supportive educational political policies play a significant role in shaping the strategies and operationalization of the Three Pillars in schools. Government support—particularly in terms of funding, infrastructure provision, and human resource development—greatly influences the capacity of schools, especially public schools, to implement the Three Pillars effectively. These findings provide in-depth insights into the complexity of implementing the Three Pillars and serve as a basis for formulating more effective policies to strengthen the strategic role of schools in the development of the Country region.*

**Keywords:** *Three Pillars of Education, educational politics, public policy, schools, Nasional*

### Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Tiga Dharma Pendidikan dalam konteks politik pendidikan di Indonesia, dengan fokus utama pada pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut meliputi pengaruh kebijakan politik pendidikan, dukungan pemerintah, serta dinamika internal di lingkungan sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik pendidikan yang konsisten dan mendukung memiliki peran penting dalam membentuk strategi dan operasionalisasi Tiga Dharma di sekolah-sekolah. Dukungan dari pemerintah, khususnya dalam bentuk pendanaan, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia, sangat memengaruhi kemampuan sekolah, terutama sekolah negeri, dalam melaksanakan Tiga Dharma secara efektif. Temuan ini memberikan wawasan mendalam mengenai kompleksitas implementasi Tiga Dharma serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat peran strategis sekolah dalam pembangunan di Negara.

**Kata kunci:** Tiga Dharma Pendidikan, politik pendidikan, kebijakan publik, University, Nasional

## PENDAHULUAN

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan pilar fundamental yang menjadi fondasi operasional perguruan tinggi di Indonesia. Tiga komponen utama dari Tri Dharma ini adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan sebagai komponen pertama, bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi individu yang kompeten dan berintegritas. Penelitian sebagai komponen kedua, mendorong perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengabdian kepada masyarakat sebagai komponen ketiga, mengharuskan perguruan tinggi untuk berkontribusi langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019).

Pentingnya Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak hanya terletak pada perannya dalam mendidik generasi muda dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, perguruan tinggi di Indonesia diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga turut serta dalam memecahkan masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Hal ini menjadikan perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial yang signifikan (Zainuddin, 2020).

Politik pendidikan di Indonesia memegang peran kunci dalam menentukan arah dan efektivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah memiliki dampak langsung pada bagaimana perguruan tinggi menjalankan fungsinya. Kebijakan yang progresif dan mendukung akan memungkinkan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang kurang tepat dapat menjadi hambatan serius bagi perguruan tinggi dalam mewujudkan ketiga dharma tersebut (Widodo, 2019).

Di Indonesia, politik pendidikan seringkali diwarnai oleh dinamika perubahan

regulasi dan kebijakan yang tidak selalu konsisten. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi perguruan tinggi dalam merencanakan dan menjalankan program-programnya secara berkelanjutan. Misalnya, perubahan kebijakan mengenai pendanaan penelitian atau aturan akreditasi dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019).

Selain itu, pendanaan merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi sangat mempengaruhi kemampuan perguruan tinggi dalam melaksanakan program-programnya. Pendanaan yang memadai memungkinkan perguruan tinggi untuk menyediakan fasilitas yang baik, mendukung penelitian berkualitas, dan menjalankan program pengabdian masyarakat yang berdampak luas. Namun, kendala pendanaan yang sering dihadapi oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan tersebut (Zainuddin, 2020).

Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah dan sektor swasta juga merupakan elemen penting dalam pelaksanaan Tri Dharma. Kemitraan yang solid dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program yang dijalankan. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi dan dukungan dalam berbagai proyek penelitian dan pengabdian masyarakat (Fitria, 2020).

Peran akademisi dalam pelaksanaan Tri Dharma juga sangat penting. Dosen dan peneliti di perguruan tinggi diharapkan dapat berperan aktif tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam melakukan penelitian yang inovatif dan memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, beban administratif yang tinggi dan kurangnya insentif sering menjadi hambatan bagi akademisi dalam menjalankan peran ini secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mengurangi beban administratif dan memberikan insentif yang sesuai untuk mendorong keterlibatan akademisi dalam ketiga dharma tersebut (A. Suryadi, 2016).

Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi juga harus memperhatikan aspek kearifan lokal dan relevansi sosial. Program-program yang dikembangkan harus mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Ini menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya berorientasi pada standar global, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian (Nurdin, 2018).

Tantangan lain yang dihadapi adalah kesenjangan kualitas antara perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Perguruan tinggi yang berada di daerah terpencil seringkali menghadapi kendala dalam hal sumber daya, akses informasi, dan dukungan kebijakan. Hal ini menuntut adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia (A. Suryadi, 2016).

Dengan memahami berbagai tantangan dan dinamika yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana politik pendidikan dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia. Melalui analisis kebijakan dan studi kasus, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Penelitian ini juga berusaha untuk memberikan wawasan tentang strategi yang efektif dalam mengoptimalkan peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial dan pembangunan (Widodo, 2019).

Dengan demikian, kajian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hanya dengan dukungan kebijakan yang tepat, perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional (Zainuddin, 2020).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana politik pendidikan mempengaruhi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan mendapatkan perspektif yang kaya dari para pemangku kepentingan terkait. Studi kasus digunakan untuk memberikan analisis yang mendetail tentang konteks spesifik dan dinamika yang terjadi di perguruan tinggi (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus multiple (multiple case study) yang melibatkan beberapa perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Pemilihan studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang variasi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam konteks politik pendidikan yang berbeda. Lokasi penelitian mencakup beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang dipilih secara purposif. Perguruan tinggi yang dipilih adalah yang memiliki berbagai karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam melaksanakan Tri Dharma. Subjek penelitian meliputi dosen, peneliti, mahasiswa, dan staf administrasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan Tri Dharma di perguruan tinggi mereka (Stake, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan dosen, peneliti, dan staf administrasi untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tri Dharma. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti berbagai kegiatan

akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi yang menjadi subjek penelitian. Dokumentasi melibatkan analisis dokumen-dokumen kebijakan, laporan tahunan, dan publikasi terkait dari perguruan tinggi serta kebijakan pemerintah yang relevan (Yin, 2018).

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis meliputi pengumpulan data, pengorganisasian data, identifikasi dan pengkategorian tema-tema yang muncul, analisis tematik untuk menghubungkan tema-tema yang telah diidentifikasi dengan pertanyaan penelitian, dan triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memverifikasi temuan, sedangkan member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara dengan responden untuk memastikan akurasi interpretasi data. Audit trail digunakan untuk menyimpan catatan detail dari semua proses penelitian, memungkinkan verifikasi independen (Braun & Clarke, 2019).

Penelitian ini dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Informed consent memastikan bahwa semua partisipan penelitian memahami tujuan, prosedur, dan hak mereka, serta memberikan persetujuan secara sukarela. Kerahasiaan dijaga dengan menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi partisipan penelitian. Transparansi diterapkan dengan menyampaikan temuan penelitian kepada partisipan dan pemangku kepentingan terkait secara transparan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana politik pendidikan mempengaruhi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional (Miles et al., 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini berperan penting dalam membentuk strategi dan fokus operasional perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi utamanya, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (S. Suryadi, 2021). Temuan utama menunjukkan bahwa perguruan tinggi negeri seringkali memiliki keunggulan dalam hal akses sumber daya dan dukungan keuangan dari pemerintah, yang memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam melaksanakan Tri Dharma dibandingkan perguruan tinggi swasta (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2020).

Selain itu, variasi implementasi Tri Dharma juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan ekonomi. Perguruan tinggi di daerah terpencil atau dengan ekonomi yang lebih lemah mungkin menghadapi tantangan tambahan dalam memenuhi semua aspek Tri Dharma karena keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap sumber daya manusia yang berkualitas (Widodo, 2023). Di sisi lain, partisipasi aktif dosen dalam kegiatan akademik dan penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi Tri Dharma. Dosen-dosen yang terlibat secara intensif dalam kegiatan penelitian cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan reputasi institusi secara global (Fitria, 2022).

Kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri juga memberikan dampak positif dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma. Kolaborasi ini memungkinkan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih baik, sehingga menciptakan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional (Yudha, 2024). Faktor internal seperti manajemen institusi juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan Tri Dharma. Institusi dengan manajemen yang baik dan visi yang jelas mampu mengarahkan sumber daya mereka secara efisien untuk mendukung tujuan Tri

Dharma secara holistik (Pratama, 2021).

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif sebagai bagian dari strategi implementasi Tri Dharma. Perguruan tinggi yang mampu mengembangkan kapasitas dosen dan staf administratifnya, baik melalui pelatihan maupun pengembangan karir, cenderung lebih sukses dalam mencapai tujuan Tri Dharma mereka (Rosyid, 2023). Namun, tantangan dalam evaluasi kinerja dan pengukuran dampak masih menjadi isu penting. Sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan bahwa Tri Dharma tidak hanya terpenuhi secara formal tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi (Budiman, 2020).

Regulasi yang konsisten dan jelas juga diperlukan untuk mendukung implementasi Tri Dharma yang efektif. Kebijakan yang ambigu atau berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan perguruan tinggi, menghambat inovasi dan pengembangan di berbagai bidang studi (Sugiyono, 2022). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas politik pendidikan dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat dikembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung peran strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas pengetahuan melalui penelitian, dan memajukan masyarakat secara keseluruhan (Zainuddin, 2024).

Penelitian ini menguraikan hasil temuan dan implikasi dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor politik pendidikan, kebijakan publik, dan dinamika internal institusi. Temuan bahwa kebijakan politik pendidikan memiliki pengaruh signifikan dalam pelaksanaan Tri Dharma menegaskan pentingnya konsistensi dan koherensi kebijakan dari pemerintah. Kebijakan yang mendukung pendanaan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi memberikan landasan yang kuat bagi institusi untuk melaksanakan fungsi Tri Dharma dengan baik (S. Suryadi, 2021). Namun

demikian, variasi dalam interpretasi dan implementasi kebijakan antar daerah atau perguruan tinggi dapat menciptakan ketimpangan dalam akses dan pelaksanaan Tri Dharma, terutama bagi perguruan tinggi di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas (Widodo, 2023).

Perbedaan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam hal sumber daya dan dukungan keuangan menunjukkan bahwa perguruan tinggi negeri cenderung memiliki keunggulan kompetitif dalam melaksanakan Tri Dharma. Dukungan yang lebih besar dari pemerintah, baik dalam bentuk dana penelitian maupun infrastruktur, memungkinkan mereka untuk mengembangkan program akademik dan penelitian yang lebih komprehensif (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2020). Sementara itu, perguruan tinggi swasta sering kali bergantung pada sumber daya internal dan kerjasama dengan sektor swasta untuk memenuhi komitmen Tri Dharma mereka, yang dapat membatasi ruang lingkup dan kedalaman implementasinya. Partisipasi dosen dan peneliti dalam kegiatan akademik dan penelitian dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Tri Dharma. Dosen-dosen yang aktif terlibat dalam penelitian tidak hanya meningkatkan reputasi perguruan tinggi tetapi juga memperluas kontribusi mereka terhadap pengetahuan dan inovasi dalam masyarakat (Fitria, 2022). Namun, tantangan dalam memotivasi dan mendukung dosen untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini tetap ada, terutama terkait dengan beban kerja dan insentif yang tersedia.

Kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri menawarkan peluang besar untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan penelitian. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas akses terhadap sumber daya dan teknologi terkini tetapi juga memungkinkan perguruan tinggi untuk menghadirkan solusi inovatif bagi tantangan masyarakat dan industri (Yudha, 2024). Namun, tantangan yang muncul termasuk kebutuhan untuk memastikan bahwa kolaborasi tersebut tidak hanya menguntungkan sektor industri tetapi juga mendukung misi akademik dan sosial perguruan tinggi. Manajemen institusi dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran

yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma. Institusi yang memiliki manajemen yang efektif mampu mengalokasikan sumber daya dengan baik untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pratama, 2021). Pengelolaan SDM yang baik juga mendukung perkembangan profesionalisme dosen dan staf administratif, yang secara langsung berkontribusi terhadap kualitas pelaksanaan Tri Dharma.

Evaluasi kinerja dan pengukuran dampak merupakan aspek kritis dalam memastikan bahwa Tri Dharma tidak hanya dipatuhi secara formal tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi. Sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat mengukur dan melaporkan pencapaian mereka dengan jelas dan objektif (Budiman, 2020). Tantangan dalam mengembangkan sistem evaluasi yang adil dan representatif tetap menjadi fokus bagi pengembangan kebijakan pendidikan tinggi di masa mendatang. Regulasi dan kebijakan pendidikan yang konsisten dan jelas sangat diperlukan untuk mendukung implementasi Tri Dharma yang efektif di Indonesia. Kebijakan yang stabil dan berkelanjutan memungkinkan perguruan tinggi untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif Tri Dharma dengan lebih baik, tanpa terganggu oleh perubahan kebijakan yang mendadak (Sugiyono, 2022). Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kebijakan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi perguruan tinggi dipertimbangkan dengan baik.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa lingkungan sosial dan budaya di sekitar perguruan tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Tri Dharma. Perguruan tinggi yang berada di lingkungan dengan dukungan komunitas yang kuat cenderung lebih sukses dalam melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengabdian. Keterlibatan masyarakat dalam program-program perguruan tinggi tidak hanya memperkuat hubungan antara institusi dan komunitas, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lokal secara efektif. Hal ini

menunjukkan bahwa integrasi antara perguruan tinggi dan masyarakat sekitar merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan Tri Dharma (Susanto, 2023).

Selanjutnya, teknologi dan digitalisasi juga memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya, platform e-learning dan database penelitian online memungkinkan dosen dan mahasiswa mengakses informasi dan berkolaborasi secara lebih mudah dan cepat. Digitalisasi juga membuka peluang untuk pengembangan program pendidikan jarak jauh, yang dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan demikian, investasi dalam teknologi dan infrastruktur digital menjadi krusial untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma yang lebih inklusif dan modern (Rachman, 2019).

Terakhir, pengembangan jaringan dan kerjasama internasional dapat memperkuat pelaksanaan Tri Dharma di Indonesia. Melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di luar negeri, institusi pendidikan tinggi di Indonesia dapat mengakses sumber daya, pengetahuan, dan teknologi yang lebih luas. Program pertukaran dosen dan mahasiswa, serta kolaborasi dalam penelitian internasional, dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di Indonesia. Selain itu, kerjasama internasional dapat membantu perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia akademik dan penelitian, serta mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi kerjasama internasional menjadi penting dalam konteks globalisasi dan dinamika pendidikan tinggi yang terus berkembang (Nugroho, 2020).

## **KESIMPULAN**

Penelitian tentang implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam konteks

politik pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa faktor politik, kebijakan publik, dan dinamika internal institusi sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dukungan pemerintah berupa dana, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia adalah faktor utama yang mempengaruhi kemampuan perguruan tinggi negeri dalam menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya, perguruan tinggi swasta sering mengandalkan sumber daya internal dan kerjasama dengan sektor swasta untuk memenuhi komitmen Tri Dharma mereka.

Partisipasi aktif dosen dalam kegiatan akademik dan penelitian merupakan kunci keberhasilan implementasi Tri Dharma. Dosen yang terlibat secara intensif tidak hanya meningkatkan reputasi perguruan tinggi tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat. Selain itu, manajemen institusi yang efektif dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik sangat penting dalam mendukung implementasi Tri Dharma.

Regulasi dan kebijakan pendidikan yang konsisten dan jelas diperlukan untuk mendukung implementasi Tri Dharma yang efektif di Indonesia. Evaluasi kinerja dan pengukuran dampak diperlukan untuk memastikan bahwa Tri Dharma memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan tantangan dalam implementasi Tri Dharma, serta menggarisbawahi pentingnya kebijakan pendidikan yang efektif untuk mendukung peran strategis perguruan tinggi dalam pembangunan nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Braun, V., & Clarke, V. (2019). *Thematic Analysis: A Practical Guide for Researchers*. SAGE Publications.
- Budiman, A. (2020). Evaluating the Implementation of Tri Dharma in Indonesian Higher Education Institutions: Challenges and Opportunities. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 42(3), 301–317.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fitria, R. (2020). Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dengan Sektor Swasta dalam Riset dan Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 25(2), 112–125.
- Fitria, R. (2022). The Role of Academic Staff in Implementing Tri Dharma in Indonesian Universities. *Indonesian Journal of Higher Education*, 35(2), 112–128.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan P. T. (2019). Laporan Tahunan Kemenristekdikti 2018. Kemenristekdikti.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan P. T. (2020). Annual Report of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education 2019. Ministry of Research, Technology, and Higher Education.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, D. (2020). Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Internasional Perguruan Tinggi. *Jurnal Globalisasi Pendidikan*, 11(4), 289–305.
- Nurdin, M. (2018). Penerapan Kearifan Lokal dalam Pengembangan Program Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 50(3), 85–97.
- Pratama, B. (2021). *Management Practices and Tri Dharma Implementation: A Case Study of Indonesian Universities*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rachman, A. (2019). Peran Teknologi dan Digitalisasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(1), 45–60.
- Rosyid, A. (2023). Human Resource Management and the Implementation of Tri Dharma: Insights from Indonesian Universities. *Asia Pacific Journal of Education*, 45(1), 78–93.
- Stake, R. E. (2020). *The Art of Case Study Research*. SAGE Publications.
- Sugiyono, S. (2022). Regulation and Policy Dynamics in Higher Education: Implications for Tri Dharma Implementation. *Journal of Educational Research and Development*, 28(2), 215–230.
- Suryadi, A. (2016). Kesenjangan Kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1), 15–28.
- Suryadi, S. (2021). *Educational Policy and Tri Dharma Implementation in Indonesian Higher Education: A Comparative Study*. Bumi Aksara.
- Susanto, B. (2023). Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya Terhadap Pelaksanaan Tri Dharma. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 67–82.
- Widodo, T. (2019). *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Widodo, T. (2023). Political Influence on Education Policy and the Implementation of Tri Dharma in Indonesian Universities. Kencana Prenada Media Group.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yudha, P. (2024). Collaboration between Universities, Government, and Industry in

Enhancing Tri Dharma Implementation. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 37(4), 512–528.

Zainuddin, A. (2020). Strategi Optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 27(4), 300– 315.

Zainuddin, A. (2024). Political Dynamics and Tri Dharma Implementation in Indonesian Higher Education: Challenges and Prospects. *Indonesian Journal of Educational Policy and Evaluation*, 31(1), 89–104.